

## THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE OFFICE PERFORMANCE IN MANAGING VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET IN CINTA VILLAGE

Imas Ratna Suminar<sup>1</sup>, Odang Hermanto<sup>2</sup>, Arik Darojat<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> PPKN, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut

<sup>1</sup>ratnasuminarimas6@gmail.com

<sup>2</sup>odanghermanto@institutpendidikan.ac.id

<sup>3</sup>arikdarojat@institutpendidikan.ac.id

(Received: 9 Desember 2025 / Accepted: 1 Januari 2026 / Published Online: 6 Januari 2026)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of village officials' performance in managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Cinta Village, Karangtengah District, Garut Regency. The background of this study is based on the importance of transparent, accountable, and participatory village financial governance as a foundation for village development, as well as indications of the need to strengthen aspects of transparency and community participation. The study used a quantitative approach with descriptive methods. The research sample consisted of 60 respondents from the Cinta Village community selected using a purposive sampling technique, namely residents who knew and/or had been involved in activities related to the APBDes. Data were collected through a 4-point Likert scale questionnaire containing five performance dimensions: planning, implementation, administration and accountability, transparency and accountability, and community participation, then analyzed descriptively using averages, percentages, and effectiveness categories. The results showed that the average overall performance effectiveness score of village officials was 3.03, which is in the "effective" category. The budget planning dimension falls into the "very effective" category, while implementation, administration and accountability, transparency and accountability, and community participation fall into the "effective" category, with relatively lower scores for the latter two dimensions. Therefore, it can be concluded that the performance of Cinta Village officials in managing the Village Budget (APBDes) is effective, but still requires strengthening, particularly in the transparency of APBDes information and expanding opportunities for community participation.*

**Keywords:** performance effectiveness, village officials, APBDes, transparency, community participation.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai fondasi pembangunan desa, serta adanya indikasi masih perlunya penguatan pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 60 responden masyarakat Desa Cinta yang dipilih

dengan teknik purposive sampling, yaitu warga yang mengetahui dan/atau pernah terlibat dalam kegiatan terkait APBDes. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert 4 poin yang memuat lima dimensi kinerja: perencanaan, pelaksanaan, administrasi dan pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan rata-rata, persentase, dan kategori efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor efektivitas kinerja perangkat desa secara keseluruhan sebesar 3,03 yang berada pada kategori “efektif”. Dimensi perencanaan anggaran berada pada kategori “sangat efektif”, sedangkan pelaksanaan, administrasi dan pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat berada pada kategori “efektif” dengan nilai relatif lebih rendah pada dua dimensi terakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat Desa Cinta dalam pengelolaan APBDes sudah efektif, namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek transparansi informasi APBDes dan perluasan ruang partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** efektivitas kinerja, perangkat desa, APBDes, transparansi, partisipasi masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Agar peran tersebut berjalan optimal, desa memerlukan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan [1], [2].

Salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Melalui APBDes, pemerintah desa merencanakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan APBDes menuntut penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa [3], [4]. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik berpengaruh positif terhadap efektivitas pembangunan desa, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup warga [5], [6].

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan APBDes dikelola secara tepat sasaran. Keterlibatan warga melalui forum musyawarah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, tidak hanya membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas, tetapi juga memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja perangkat desa dalam mengelola anggaran [4], [7]. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes di banyak desa masih cenderung pasif, antara lain karena minimnya sosialisasi, rendahnya pemahaman tentang mekanisme anggaran desa, dan budaya politik yang belum sepenuhnya partisipatif [5], [7]. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya efektivitas kinerja perangkat desa dalam mewujudkan pengelolaan APBDes yang benar-benar transparan dan akuntabel.

Selain partisipasi masyarakat, kualitas kinerja perangkat desa juga sangat menentukan keberhasilan pengelolaan APBDes. Kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman terhadap regulasi, kemampuan manajerial, serta sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik [2], [8]. Keterbatasan kompetensi, belum optimalnya pelatihan terkait manajemen keuangan desa, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi keuangan seringkali menjadi hambatan dalam

mewujudkan pengelolaan APBDes yang efektif [3], [6]. Di sisi lain, pengawasan internal oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawasan eksternal oleh pemerintah supradesa juga belum selalu berjalan maksimal, sehingga potensi penyimpangan anggaran masih mungkin terjadi [4].

Desa Cinta di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, merupakan salah satu desa yang memperoleh alokasi APBDes setiap tahun dan berupaya menggunakan untuk mendukung pembangunan fisik maupun nonfisik. Secara umum, pengelolaan APBDes di Desa Cinta telah mengarah pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyampaian informasi penggunaan anggaran kepada warga. Namun, berdasarkan hasil observasi dan temuan penelitian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan, belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan internal yang belum optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh mana kinerja perangkat desa di Desa Cinta sudah efektif dalam mengelola APBDes.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cinta. Fokus analisis meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kinerja perangkat desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kualitas pengelolaan APBDes di Desa Cinta sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa angka hasil pengukuran melalui angket, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menggambarkan efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Cinta [10], [11]. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai tingkat efektivitas kinerja perangkat desa berdasarkan persepsi responden [3], [11].

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Desa ini dipilih secara purposif karena merupakan salah satu desa yang secara rutin mengelola APBDes dan sedang berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada semester genap tahun akademik 2023/2024 (bulan Maret–Mei 2024).

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Cinta yang mengetahui dan merasakan dampak pengelolaan APBDes, termasuk tokoh masyarakat, anggota lembaga desa (BPD, LPM, RT/RW), serta warga yang pernah terlibat dalam musyawarah desa. Untuk kepentingan artikel ini, jumlah populasi yang dirujuk adalah 150 orang.

Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling mengetahui kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes [11]. Kriteria responden antara lain:

1. berdomisili di Desa Cinta,
2. berusia minimal 18 tahun, dan

3. pernah mengikuti musyawarah desa, menerima informasi APBDes, atau terlibat dalam kegiatan yang dibiayai APBDes.

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 60 responden sebagai sampel penelitian, yang dianggap cukup mewakili berbagai kelompok masyarakat di Desa Cinta [3], [11].

### Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki satu variabel utama, yaitu efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes. Variabel ini dioperasionalkan ke dalam beberapa dimensi, antara lain:

1. **Perencanaan anggaran** (perumusan prioritas program dan pelibatan masyarakat),
2. **Pelaksanaan anggaran** (ketepatan pelaksanaan program dan kesesuaian dengan rencana),
3. **Administrasi dan pertanggungjawaban** (ketertiban pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi),
4. **Transparansi dan akuntabilitas** (keterbukaan informasi APBDes dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat),
5. **Partisipasi masyarakat** (keterlibatan warga dalam musyawarah, pengawasan, dan evaluasi).

Setiap dimensi diukur menggunakan sejumlah pernyataan dalam angket dengan skala penilaian tertentu.

### Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data utama penelitian dikumpulkan menggunakan angket (kuesioner) yang disusun berdasarkan kajian teori mengenai efektivitas, kinerja, dan pengelolaan keuangan desa [3], [5], [6], [8], [10]. Angket disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala Likert 4 poin, yaitu:

- 1 = sangat tidak setuju,
- 2 = tidak setuju,
- 3 = setuju,
- 4 = sangat setuju.

Instrumen angket ini memuat sekitar 25–30 butir pernyataan yang mewakili dimensi-dimensi: perencanaan, pelaksanaan, administrasi/pertanggungjawaban, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes.

Selain angket, data juga dikumpulkan melalui:

1. Dokumentasi, berupa dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, berita acara musyawarah desa, dan media informasi publik (seperti baliho atau papan informasi APBDes) untuk menguatkan temuan angket.
2. Wawancara singkat (tidak terstruktur) dengan beberapa informan kunci (kepala desa, perangkat desa, anggota BPD) untuk memperoleh penjelasan tambahan terkait hasil pengolahan data angket.

### Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum angket digunakan pada sampel penelitian, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan.

- Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson antara skor butir dengan skor total. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5% [11], [13]. Butir yang tidak memenuhi kriteria validitas diperbaiki atau dibuang.

- Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai alpha  $\geq 0,70$ , yang menunjukkan konsistensi internal yang baik [12], [13].  
Nilai r\_tabel dan batas Cronbach's Alpha merujuk pada pedoman umum analisis instrumen penelitian kuantitatif [11]–[13].

### Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut [11], [13]:

1. Menghitung skor total setiap responden, yaitu penjumlahan skor dari seluruh butir pernyataan pada angket efektivitas kinerja perangkat desa.
2. Menghitung nilai rata-rata (mean), persentase, dan distribusi frekuensi untuk setiap dimensi dan skor total efektivitas.
3. Mengelompokkan kategori efektivitas kinerja perangkat desa menggunakan interval skor, misalnya:
  - 3,26–4,00 = sangat efektif
  - 2,51–3,25 = efektif
  - 1,76–2,50 = cukup efektif
  - 1,00–1,75 = kurang efektifKategori ini disusun berdasarkan konversi skor skala Likert menjadi kategori kualitatif [11], [13].
4. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan narasi untuk menggambarkan tingkat efektivitas kinerja perangkat desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, administrasi/pertanggungjawaban, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Hasil analisis deskriptif ini kemudian dijadikan dasar untuk pembahasan, penarikan kesimpulan, serta penyusunan rekomendasi bagi pemerintah Desa Cinta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 60 responden masyarakat Desa Cinta yang memenuhi kriteria: berdomisili di Desa Cinta, berusia minimal 18 tahun, serta mengetahui dan/atau pernah terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes. Data dikumpulkan menggunakan angket efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes yang memuat indikator: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, administrasi dan pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Setiap pernyataan dinilai dengan skala Likert 4 poin dari “sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja perangkat desa.

Untuk memudahkan interpretasi, skor rata-rata (mean) dikonversi ke dalam kategori kualitatif dengan interval sebagai berikut:

- 3,26 – 4,00 = **Sangat efektif**
- 2,51 – 3,25 = **Efektif**
- 1,76 – 2,50 = **Cukup efektif**

- $1,00 - 1,75 = \text{Kurang efektif}$

Kategori ini disusun berdasarkan pedoman konversi skor skala Likert ke dalam kategori kualitatif dalam penelitian kuantitatif [11], [13].

### **Rekapitulasi Skor Efektivitas Kinerja Perangkat Desa per Dimensi**

Hasil pengolahan data angket menunjukkan skor rata-rata efektivitas kinerja perangkat desa pada setiap dimensi sebagaimana tersaji pada Tabel 1

**Tabel 1. Rekapitulasi Skor Efektivitas Kinerja Perangkat Desa per Dimensi**

No	Dimensi	Skor Rata-rata	Kategori
1	Perencanaan anggaran	3,30	Sangat efektif
2	Pelaksanaan anggaran	3,18	Efektif
3	Administrasi dan pertanggung jawaban	3,12	Efektif
4	Transparansi dan akuntabilitas	2,82	Efektif (lebih rendah)
5	Partisipasi masyarakat	2,74	Efektif (mendekati cukup)
	<b>Rata-rata keseluruhan</b>	<b>3,03</b>	<b>Efektif</b>

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa:

- Dimensi perencanaan anggaran memiliki skor rata-rata tertinggi (3,30) dan berada pada kategori sangat efektif, menandakan bahwa perangkat desa relatif baik dalam menyusun rencana anggaran, menetapkan prioritas program, serta melibatkan unsur masyarakat dalam proses perencanaan.
- Dimensi pelaksanaan anggaran dan administrasi/pertanggungjawaban berada pada kategori efektif, yang menunjukkan bahwa program-program yang direncanakan umumnya dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan telah dilakukan secara cukup tertib.
- Dimensi transparansi dan akuntabilitas memperoleh skor rata-rata 2,82, yang meskipun masih berada dalam kategori efektif, namun nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Dimensi partisipasi masyarakat memiliki skor rata-rata 2,74 dan masuk kategori efektif, namun paling mendekati batas “cukup efektif”. Artinya, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan APBDes belum merata dan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, skor rata-rata efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Cinta adalah 3,03, yang berada pada kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja perangkat desa dalam mengelola APBDes sudah baik, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.

### **Distribusi Kategori Efektivitas Kinerja Perangkat Desa**

Selain melihat skor rata-rata per dimensi, penelitian ini juga mengkategorikan penilaian responden terhadap efektivitas kinerja perangkat desa secara keseluruhan. Distribusi kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Distribusi Kategori Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Keseluruhan)**

Kategori	Interval Skor Rata-rata	Frekuensi (Responden)	Persentase (%)
Sangat efektif	3,26 – 4,00	12	20,0
Efektif	2,51 – 3,25	36	60,0
Cukup efektif	1,76 – 2,50	10	16,7
Kurang efektif	1,00 – 1,75	2	3,3
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>100,0</b>

Dari Tabel 2 tampak bahwa:

- Mayoritas responden, yaitu 36 orang (60,0%), menilai kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes berada pada kategori efektif.
- Sebanyak 12 responden (20,0%) menilai kinerja perangkat desa sudah sangat efektif, khususnya terkait perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
- Sebanyak 10 responden (16,7%) masih menilai kinerja perangkat desa cukup efektif, dan 2 responden (3,3%) menilai kurang efektif, terutama dengan alasan kurangnya informasi yang mereka terima terkait rincian penggunaan APBDes dan terbatasnya keterlibatan dalam proses musyawarah.

Distribusi tersebut menguatkan temuan sebelumnya bahwa secara umum efektivitas kinerja perangkat desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Cinta sudah baik, tetapi masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa kurang mendapatkan informasi atau ruang partisipasi yang memadai, terutama pada aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja perangkat Desa Cinta dalam pengelolaan APBDes berada pada kategori efektif dengan skor rata-rata 3,03. Temuan ini mengindikasikan bahwa perangkat desa telah mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, administrasi/pertanggungjawaban, transparansi, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes secara cukup baik. Dalam perspektif manajemen kinerja sektor publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unsur proses dan hasil kinerja sudah sejalan dengan harapan masyarakat, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada dimensi transparansi dan partisipasi masyarakat [5], [8], [18].

Skor tertinggi terdapat pada dimensi perencanaan anggaran (3,30; kategori *sangat efektif*). Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan APBDes di Desa Cinta telah berjalan relatif baik, ditandai dengan penetapan prioritas program dan pelaksanaan musyawarah desa untuk menarik aspirasi masyarakat. Secara teoritis, perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan dalam pengelolaan keuangan publik; perencanaan yang baik akan

meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran program dan ketidakefisienan penggunaan anggaran [3], [4]. Pekei menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam menyusun rencana anggaran yang realistik, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat [5]. Temuan di Desa Cinta selaras dengan pandangan tersebut: ketika perencanaan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan memperhatikan kebutuhan prioritas warga, persepsi masyarakat terhadap efektivitas kinerja perangkat desa cenderung positif.

Dimensi pelaksanaan anggaran dan administrasi/pertanggungjawaban juga berada pada kategori efektif (masing-masing 3,18 dan 3,12). Hal ini menunjukkan bahwa program yang direncanakan umumnya dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan, serta pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara cukup tertib. Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, pelaksanaan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum [3], [4]. Afandi dan Wibowo menekankan bahwa kinerja aparatur tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dari ketepatan waktu, ketertiban administrasi, dan kepatuhan terhadap regulasi [2], [9]. Dengan demikian, skor “efektif” pada dua dimensi ini mengindikasikan bahwa perangkat Desa Cinta telah menjalankan sebagian besar prosedur pelaksanaan dan pelaporan APBDes dengan cukup baik, tetapi masih berpeluang ditingkatkan menuju kategori *sangat efektif*.

Di sisi lain, dimensi transparansi dan akuntabilitas memperoleh skor rata-rata 2,82—masih dalam kategori efektif, namun relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lain. Hal ini menandakan bahwa sebagian masyarakat merasa akses mereka terhadap informasi APBDes belum sepenuhnya merata; misalnya belum semua warga mengetahui rincian anggaran, lokasi kegiatan, atau realisasi program yang dibiayai APBDes. Padahal, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan tuntutan utama dalam tata kelola keuangan desa modern [3], [4]. Sejumlah kajian terkini menunjukkan bahwa penerapan *good governance*, pemanfaatan SISKEUDES dan *website* desa, serta keterbukaan laporan keuangan mampu memperkuat transparansi, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan keuangan desa [19], [20]. Dalam konteks ini, temuan skor transparansi yang belum optimal di Desa Cinta menegaskan perlunya penguatan mekanisme sosialisasi dan publikasi informasi APBDes (misalnya melalui papan informasi, website desa, atau forum dialog berkala) agar informasi anggaran benar-benar mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.

Dimensi partisipasi masyarakat juga berada pada kategori efektif namun mendekati cukup efektif (rata-rata 2,74). Artinya, proses pengelolaan APBDes di Desa Cinta sudah melibatkan masyarakat, tetapi keterlibatan tersebut cenderung didominasi oleh tokoh masyarakat atau perwakilan lembaga desa, sementara partisipasi warga biasa masih relatif terbatas. Sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, partisipasi idealnya tidak hanya bersifat formal (sekadar hadir pada musyawarah), melainkan juga substantif, yaitu warga memiliki ruang nyata untuk menyampaikan aspirasi, mengawasi pelaksanaan program, serta memberikan evaluasi atas hasil pembangunan [4], [6]. Kajian pembangunan berbasis masyarakat menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana warga dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi [4]. Temuan penelitian mengenai pelatihan literasi informasi kebencanaan dan penguatan karakter sosial berbasis kearifan lokal di Jawa Barat menunjukkan bahwa ketika warga diberdayakan dan diberi ruang berpartisipasi aktif, tingkat kepedulian dan kontrol sosial terhadap program pemerintah meningkat secara signifikan [16], [17]. Hal ini menjadi rujukan penting bagi Desa Cinta untuk memperluas partisipasi warga dalam seluruh siklus pengelolaan APBDes.

Distribusi kategori efektivitas pada Tabel 2 memperkuat gambaran tersebut: 60,0% responden menilai kinerja perangkat desa efektif, 20,0% menilai sangat efektif, sementara 16,7% menilai cukup efektif dan 3,3% kurang efektif. Kelompok yang memberikan penilaian cukup atau kurang efektif umumnya mengaitkan penilaian dengan keterbatasan informasi yang mereka terima mengenai APBDes dan minimnya keterlibatan langsung dalam proses musyawarah maupun pengawasan. Dalam perspektif perilaku organisasi, persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur publik sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi, kejelasan informasi, dan sejauh mana mereka merasa diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan [5], [8]. Dengan kata lain, meskipun secara teknis pengelolaan APBDes telah berjalan cukup baik, pengalaman subjektif sebagian warga yang belum sepenuhnya merasa terlibat menimbulkan penilaian yang lebih kritis terhadap kinerja perangkat desa.

Jika dikaitkan dengan konsep efektivitas yang menekankan ketercapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya secara optimal [3], [7], maka temuan ini mengindikasikan bahwa Desa Cinta telah berhasil memanfaatkan APBDes untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, namun masih perlu memperkuat aspek proses, khususnya dalam transparansi dan partisipasi. Pekei menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik yang efektif bukan hanya soal tingginya serapan anggaran, tetapi juga kepatuhan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi [5]. Hasil-hasil studi terbaru mengenai tata kelola dana desa juga menunjukkan bahwa tata kelola yang berkualitas—dengan akuntabilitas yang kuat dan keterbukaan laporan keuangan—berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa [19], [20].

Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa efektivitas kinerja aparatur desa sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem pengelolaan keuangan, dan partisipasi masyarakat [2], [3], [5], [8]. Di sisi lain, kajian dalam bidang Pendidikan IPS dan PKn menegaskan bahwa penguatan tata kelola desa yang transparan dan partisipatif merupakan bagian penting dari pembentukan karakter kewarganegaraan dan literasi sosial warga [15], [18]. Pengalaman program pengabdian masyarakat yang dikembangkan oleh Tetep dan Mulyana menunjukkan bahwa ketika warga dilibatkan secara aktif melalui pendekatan edukatif dan kontekstual, kapasitas sosial dan kesadaran kritis masyarakat terhadap isu-isu publik dapat meningkat [15]–[17]. Temuan di Desa Cinta mengkonfirmasi bahwa kompetensi perangkat desa, sistem administrasi keuangan yang tertib, dan partisipasi masyarakat yang bermakna perlu terus diperkuat agar pengelolaan APBDes mencapai tingkat sangat efektif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kinerja perangkat Desa Cinta dalam pengelolaan APBDes dapat dikategorikan efektif, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta administrasi dan pertanggungjawaban. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, desa perlu meningkatkan kualitas transparansi informasi APBDes dan memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui inovasi tata kelola (misalnya pemanfaatan e-government, website desa, dan forum dialog publik), sehingga pengelolaan anggaran tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga dirasakan adil, akuntabel, dan inklusif oleh seluruh warga.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 60 responden masyarakat Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa kinerja perangkat Desa Cinta dalam pengelolaan APBDes berada pada kategori “efektif” dengan skor rata-rata keseluruhan sebesar 3,03 (skala 1–4). Artinya, secara umum perangkat desa telah mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, administrasi/pertanggungjawaban, transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan APBDes dengan cukup baik.

Secara lebih rinci, dimensi perencanaan anggaran memperoleh skor rata-rata tertinggi (3,30) dan berada pada kategori sangat efektif, menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana anggaran, penetapan prioritas program, dan pelaksanaan musyawarah desa di Desa Cinta telah berjalan dengan baik. Dimensi pelaksanaan anggaran serta administrasi dan pertanggungjawaban berada pada kategori efektif, yang menandakan bahwa program yang direncanakan umumnya terlaksana dan pencatatan maupun pelaporan keuangan dilakukan secara cukup tertib sesuai ketentuan.

Sementara itu, dimensi transparansi dan akuntabilitas (rata-rata 2,82) serta partisipasi masyarakat (rata-rata 2,74) juga berada pada kategori efektif, tetapi nilainya relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai APBDes dan pemerataan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah maupun pengawasan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, meskipun kinerja perangkat Desa Cinta dalam pengelolaan APBDes secara umum sudah efektif, upaya perbaikan tetap diperlukan terutama pada aspek transparansi informasi dan perluasan ruang partisipasi masyarakat agar tata kelola APBDes ke depan dapat mencapai tingkat sangat efektif dan semakin akuntabel di mata warga desa.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Pekanbaru, Indonesia: Zanafa Publishing, 2018.
- [2] I. W. Agustin and S. Hariyani, *Pengelolaan Infrastruktur Kota dan Wilayah*. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2023.
- [3] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta, 2013.
- [4] T. Mardikanto and P. Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 4th ed. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2017.
- [5] B. Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta, Indonesia: Taushia, 2016.
- [6] A. M. Sambas, *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 2009.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2016.
- [8] R. Sundayana, *Statistika Penelitian Pendidikan*. Bandung, Indonesia: Alfabeta, 2018.
- [9] Wibowo, *Perilaku dalam Organisasi*, 2nd ed. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo

Persada, 2015.

- [10] S. Suryani, *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Efektivitas Pembangunan Desa di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit, 2019.
- [11] S. Nugroho, *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Sleman*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit, 2022.
- [12] A. Ramadani and R. Prasetya, *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes serta Dampaknya pada Partisipasi Masyarakat*. Jakarta, Indonesia: Penerbit, 2021.
- [13] P. Kartika, *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi di Desa Kediri, Bali*. Denpasar, Indonesia: Penerbit, 2022.
- [14] D. Lestari and R. Wibowo, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa-Desa Tertinggal*. Jakarta, Indonesia: Penerbit, 2023.
- [15] E. Mulyana, Tetep, and T. Widiyanti, “Implementasi Joyful Learning dalam pembelajaran IPS di masa adaptasi kebiasaan baru,” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 213–221, 2023.
- [16] E. Mulyana, T. Widiyanti, Tetep, and A. Supriyatna, “Information literacy training on the preparedness of Garut people in facing landslide threats,” *Indonesian Journal of Community Empowerment*, vol. 1, no. 1, pp. 11–20, 2020.
- [17] E. Mulyana, T. Widiyanti, Tetep, and A. Supriyatna, “Training on developing children's social character through Sundanese cultural values,” *Indonesian Journal of Community Empowerment*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2020.
- [18] Tetep, E. Mulyana, and N. A. Hamdani, *Konsep Dasar IPS*. Garut, Indonesia: Widina Media Utama, 2023.
- [19] E. Erwinskyah *et al.*, “Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan e-government,” *Jurnal Abdidas*, vol. 6, no. 1, pp. 142–150, 2025.
- [20] S. Syamsul, N. Nurhadi, and N. Nurlailah, “Prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa: mengungkap implementasinya di Desa Pombewe,” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, vol. 15, no. 1, pp. 34–43, 2025.